



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>
FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 13(2), 277-288



RESEARCH ARTICLE

DOKTRIN EKONOMI SANG WANITA BESI DI INGGRIS TAHUN 1979-1990

Setia Purnama

*Prodi Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia
setiap613@gmail.com*

To cite this article: Purnama, S. (2024). Doktrin ekonomi sang wanita besi di Inggris tahun 1979-1990. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 13(2), 277-288. <https://doi.org/10.17509/factum.v13i2.63544>.

Abstract

Broadly speaking, this research discusses the economic policies of Britain during Margaret Thatcher's tenure from 1979 to 1990. The gradual and steady sequence of events filling the dynamics of the British economy compelled Margaret Thatcher to devise a long-term plan regarding economic policies. This study aims to provide an understanding of Margaret Thatcher's struggles in dealing with the economic turmoil in Britain from 1979 to 1990. The method employed is historical, involving four steps: heuristic, criticism, interpretation, and historiography. According to the research findings, Thatcher's background in implementing free market policies was aimed at reforming the British economy. Thatcher made several efforts to bring about changes that were perceived as beneficial for the economy of Britain. Ultimately, Thatcher's measures had both positive and negative impacts on various social and economic strata.

Abstrak

Ditilik secara garis besar penelitian ini membahas kebijakan Ekonomi Inggris pada masa Margaret Thatcher dalam kurun waktu 1979-1990. Runtutan peristiwa yang pelan dan pasti mengisi dinamika perekonomian di Inggris, membuat Margaret Thatcher harus membuat rencana panjang terkait kebijakan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman bagaimana pergulatan Margaret Thatcher dalam mengatasi gejolak Ekonomi Inggris 1979-1990. Metode yang digunakan adalah historis dengan melakukan tahapan empat langkah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Merujuk pada hasil penelitian, latar belakang Thatcher mengambil kebijakan pasar bebas adalah mereformasi Ekonomi Inggris. Thatcher melakukan beberapa upaya untuk mencapai perubahan yang dirasa baik untuk Inggris dalam sektor ekonomi. Pada akhirnya langkah Thatcher membawa dampak positif dan negatif dalam tiap lapisan sosial dan ekonomi.

© 2024 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

Article Info

Article History:
Submitted/Received 26 Oct. 2023
First Revised 30 January 2024
Accepted 01 Sept 2024
First Available online 30 Oct 2024
Publication 30 Oct 2024

Keyword:

Margret Thatcher,
Economic Policy,
Free Market,
Neoliberalism

PENDAHULUAN

Hubungan paska Perang Dunia II antara blok barat dan timur memicu konflik yang baru di Eropa. Dua kekuatan besar Uni Soviet di timur dan sekutu di barat. Menjadikan kondisi perekonomian Eropa memburuk. Inggris juga ikut terkena dampaknya dari masa akhir Perang Dunia II sampai pada masa pemerintahan Margaret Thatcher mencapai puncaknya. Pemerintahan sebelum Thatcher adalah James Callaghan, ia adalah Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh, pada masa pemerintah Callaghan Ekonomi Inggris tidak begitu membaik. Juga diikuti dengan krisis Irlandia Utara terjadi pada tahun 1970 di mana keadaan ini mengguncang pemerintahan, dan konflik ini didasari oleh perbedaan agama, antara Katolik di Irlandia Utara dan Anglikan di Inggris (Bew, 2009, hlm. 49).

Peristiwa itu penting juga menjadi sorotan, sebab Inggris belum keluar dari permasalahan ekonomi tapi muncul konflik yang sudah lama tentang agama. Di sisi lain Inggris mulai bergerak pada masalah ekonomi yang menghantui. Lalu oposisi dari Partai Konservatif mulai bergerak, muncullah tokoh politik dengan pandangan konservatif.

Pada sisi Partai Konservatif Edward Heath dikritik oleh Margaret Thatcher yang dinilai Heath kurang konservatif sebagai calon pemimpin partai. Ketika ia menantang Edward Heath dalam pemilihan ketua partai, ia menang dalam satu putaran (Horton & Simmons, 2006, hlm. 159). Peristiwa yang terjadi dalam internal partai turut memberi warna dalam gejala perubahan di Inggris

Meski Inggris negara yang cukup kuat secara ekonomi namun kegagalan Inggris dalam beberapa dekade terutama tahun 1970-an mengakibatkan angka pengangguran tinggi (Cooper, 2012, hlm. 2). Ini yang menjadi masalah pada pemerintahan Callaghan dan menjadi serangan telak dari Partai Konservatif pada pemerintahannya yang merupakan oposisi. Pendapat ini pun masih

menjadi perdebatan di kala itu, namun Partai Konservatif mengambil peluang ini.

Seperti yang dipaparkan dari awal bawa perjalanan Inggris cukup berat atau mungkin bisa dibilang sangat berat. Ini menjadi tantangan ke depannya pada kurun waktu 1979-1990 apakah beban Inggris akan berkurang atau justru semakin banyak dan juga menjadi rumit lalu menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Peneliti mengambil kurun waktu ini juga bukan tanpa alasan yang jelas, sebab periode kepemimpinan Margaret Thatcher adalah 1979-1990 yang pada kurun waktu itu terdapat dinamika kepemimpinan. Tentu peneliti hanya akan berfokus pada langkah yang dilakukan oleh Margaret Thatcher dalam mengatasi masalah Ekonomi Inggris. Masalah yang berlarut-larut cukup lama dalam pusran Perang Dingin membawa Inggris pada masa Thatcher terpuruk cukup lama dari 1979-1990.

METODE

Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam mengkaji atau bisa disebut membedah permasalahan adalah metode historis dengan menggunakan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Menurut Gottschalk (dalam Ismaun, 2016, hal. 43) metode historis adalah proses menguji serta menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Sedangkan menurut penelitian historis bertujuan untuk menemukan generalisasi, generalisasi memungkinkan mencari sebab dari peristiwa-peristiwa sejarah. Dua pendapat tersebut menegaskan bahwa metode merupakan cara atau alat yang digunakan peneliti untuk membongkar objek penelitian. Dalam kasus penelitian sejarah objek yang diteliti ialah peristiwa tentunya melalui tahapan-tahapan penelitian historis. Adapun beberapa tahapan dalam penelitian historis ialah sebagai berikut. Tahap pertama adalah pengumpulan sumber (heuristik), serangkaian cara-cara yang digunakan untuk menemukan sumber

melalui studi kepustakaan atau melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Proses pengumpulan sumber sendiri dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis hasil karya ilmiah dari penulis lain. Mulai dari buku, artikel-artikel yang dimuat dalam situs internet. Upaya yang dilakukan peneliti ialah mencari dari situs resmi di internet berupa arsip, e-book, dan jurnal.

Tahapan selanjutnya adalah kritik sumber tahapan ini dibagi menjadi dua yaitu kritik eksternal dan internal. Bila merujuk pada Sjamsuddin sumber sejarah terbagi menjadi beberapa jenis. Sjamsuddin (2012, hlm. 84) menjelaskan bahwa Sumber asli (Orisinal) dari sumber pertama itu ialah evidensi (bukti) yang kontemporer (sezaman) dengan suatu peristiwa yang terjadi. Tentunya beberapa jenis sumber yang disebutkan harus melalui dua tahap kritik eksternal dan internal. Kritik internal peneliti membandingkan buku satu dengan yang lainnya demikian pula dengan jurnal. Sedangkan untuk sumber berupa arsip peneliti memastikan dengan cara melihat pihak yang menerbitkan arsip tersebut yang merupakan pihak yang berwenang.

Kemudian langkah yang dilakukan setelah melalui tahap heuristik, kritik sumber, selanjutnya adalah interpretasi. Dalam tahap ini mengolah data berupa fakta-fata menjadi sebuah analisis atau tafsir dari informasi dan fakta yang tersaji. Hasil akhir dari penelitian berupa Historiografi, pada tahap ini peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan berupa artikel jurnal

PEMBAHASAN

Untuk mengatasi masalah Ekonomi Inggris Sesuai dengan teori moneterisme, pemerintahan Thatcher yang pertama percaya bahwa tujuan utama dari kebijakan ekonomi adalah untuk mempertahankan stabilitas harga dengan mengendalikan jumlah uang beredar. Agar pasar bebas berhasil, maka pertama inflasi harus dikalahkan. Memang,

inflasi melemahkan pasar dengan destabilisasi mekanisme pertukaran. Namun, mengingat bahwa pengeluaran pemerintah pada masa Partai Buruh telah mengendalikan jumlah uang beredar, meskipun atas desakan IMF, kebijakan moneter lebih merupakan kasus kontinuitas daripada perubahan (Cooper, 2012, hlm.42). Demikian, upaya kebijakan moneter merupakan komponen penting dalam rencana ekonomi Thatcher dan merupakan dasar dan bagi pembangunan ekonomi lainnya. Thatcher mengadopsi strategi sedikit demi sedikit, dimana masalah dipilah dalam urutan urgensi dan kesulitannya, sementara yang lain siap untuk perhatian penuh di masa depan dengan langkah-langkah kecil, Thatcher sering bersifat eksperimental. Jadi dalam istilah pertamanya kita telah melihat tiga kampanye besar: mengalahkan inflasi, pembatasan kekuatan serikat, dan privatisasi, secara berurutan. Oleh karena itu, dalam tiga tahun pertamanya, pertempuran Thatcher melawan inflasi dan masalah politik yang dominan, memastikan bahwa masa jabatan pertamanya ditentukan oleh label moneterisme.

Dampak Sosial Ekonomi

Upaya selanjutnya untuk mengatasi memburuknya perekonomian Inggris, salah satunya dengan mengefisienkan anggaran. Guna mencabut akar permasalahan ekonomi, Aitken (2013, hlm. 301) langkah pertama untuk mengatasi kepelikan ekonom Inggris ialah memotong anggaran publik, 3 miliar Euro dipotong dari anggaran tahun 1979 dan 1980, namun tetap kesulitan sebab anggaran lain yang besar, seperti pertahanan dan kesehatan yang pengeluarannya juga besar. Pemotongan pengeluaran publik bukan tanpa alasan, pasalnya pengeluaran publik yang terlalu besar membebani pemerintah.

Selain pengeluaran publik Sektor industri Nasional juga membebani. Subsidi yang juga merupakan salah satu bagian dari sektor pengeluaran publik juga membuat cukup kewalahan. Dengan label industri Nasional

pemerintah seperti punya kewajiban penuh atas subsidi dan cenderung tidak memiliki pilihan. Bila ditilik dengan industri swasta dengan mekanisme persaingan pasar sehingga menciptakan harga yang bersaing, membuat pilihan yang lebih banyak. Dengan begitu tidak perlu bagi pemerintah untuk membantu dengan subsidi. Sebab pasar akan menyesuaikan kebutuhan dari para konsumen.

Pola pikir seperti ini lah yang coba dikembangkan oleh pemerintahan Margaret Thatcher. Dengan mencoba mengurangi ketergantungan publik atau masyarakat dan membiarkan pasar yang mengaturnya. Menerangkan sebuah konsep selalu lebih mudah dari menerapkannya mungkin itu kalimat yang tepat untuk menggambarkan situasi yang dihadapi oleh Margaret Thatcher. Meyakinkan suara parlemen tidaklah mudah terlebih ia akan berhadapan dengan Partai Buruh yang jelas akan menentang strateginya untuk mengurangi anggaran publik. Masalah bukan hanya pada tahapan elit partai saja, serikat buruh yang saat itu punya pengaruh kuat tentunya juga akan menentang. Thatcher melakukan konfrontasi langsung pada serikat buruh. Pertanyaan yang selalu diajukan oleh banyak pengamat, apa yang akan pemerintah lakukan dengan tuntutan upah dan kekuatan dari serikat buruh.

Kebijakan publik yang ditentang banyak pakar dan lawan politik ialah pemotongan anggaran publik. Pada situasi yang buruk terkait inflasi juga masyarakat mengalami ekonomi yang disebabkan pengangguran meningkat. Thatcher malah ingin memotong anggaran publik. Anggaran ini cukup penting berkaitan dengan bantuan pada masyarakat yang di dalamnya termasuk subsidi. Para pakar memberikan solusi untuk menurunkan suku bunga pinjaman guna membantu. Perdebatan yang cukup sulit terkait pemotongan anggaran publik akhirnya terbukti benar pada 1981. Dikeluarnya anggaran publik tidak dipotong asumsi pengeluaran ialah 14 miliar euro sekitar 6% dari GDP Inggris, namun dengan

pemotongan dan skema pajak menjadi 10,5 miliar euro sekitar 4,5% dari GDP Inggris (Atken. 2013, hlm. 310).

Skema ini semakin meneguhkan keyakinan doktrin ekonomi Thatcher. Dengan demikian mengukuhkan langkah reformasi ekonomi Thatcher untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam jantung Ekonomi Inggris yaitu industri. Sebagai sebuah negara yang mempelopori revolusi industri, penting bagi Thatcher untuk mengubah kutub penggerak industri yang asalnya dari serikat buruh pada para pemegang saham. Sebelum melangkah lebih jauh kesan, efisiensi anggaran merupakan langkah awal untuk mewujudkan Inggris menjadi industri berbasis pada pasar bebas. Dalam kerangka atau pondasi yang dibangun oleh Thatcher atas dasa neoliberal maka diperlukan terobosan seperti apa yang ia lakukan sekarang. Meski mendapat tekanan dan penolakan dari lawan politiknya tapi Thatcher selalu teguh dalam pendiriannya.

Meskipun Thatcher keras dalam melakukan pemotongan anggaran dan cenderung tidak tergoyahkan. Tapi tetap ada bagian ketika Thatcher bahkan tidak dilibatkan atau diabaikan dalam kabinet-nya sendiri. Lloyd (1994, hlm.651) Di awal nya menteri keuangan Lawson menjadi skeptis tentang pendekatan ini dan pada awal 1987 dia telah memutuskan untuk menjalankan kebijakan keuangan dengan menjaga nilai pound tetap stabil dari tiga deutschmark. Keputusan ini memiliki nuansa politik. Itu tersirat dekat dengan keputusan terkait mekanisme nilai tukar dari European Economic Community, dan ini mungkin menjelaskan mengapa dia tidak pernah membicarakannya secara langsung dengan Thatcher. Dia mengklaim ditinggalkan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi dalam diskusi tentang kebijakan pemerintah dengan beberapa wartawan keuangan pada November 1987. Lawson mengacu pada percakapan dengannya pada bulan Desember 1987 untuk membuktikan bahwa dia tahu bagaimana situasinya, akan tetapi lebih meyakinkan jika

dia bisa merujuk pada percakapan sebelum November untuk menunjukkan bahwa dia telah memberi tahu dia dengan benar. Peristiwa ini nantinya merupakan bagian akhir dari pergumulan Thatcher dengan anggaran. Langkah di tahun akhir 1987 menjelang pemilihan periode ke-4 bagi Margaret Thatcher dan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi Inggris.

Privatisasi Industri Nasional

Model ekonomi di Inggris digambarkan sebagai ekonomi Anglo-liberal atau, dalam berbagai literatur kapitalisme, yang mengacu pada ekonomi pasar liberal. Pada dasarnya tatanan ekonomi kapitalis menjunjung tinggi kebebasan pertukaran yang diekspresikan dalam hubungan pasar, dilihat sebagai bagian dari kebebasan politik di negara-negara demokratis. Pasar adalah tempat dimana individu yang berusaha memaksimalkan kesejahteraan mereka dapat membuat pilihan yang efisien berdasarkan persepsi perseorangan, tentang biaya peluang. Gerakan pasar bebas dapat dilihat sebagai pembentukan kondisi yang diperlukan untuk mewujudkan kebebasan ekonomi dan kesuksesan individu. Pemodelan pasar di Inggris dapat dilihat dari investasi. Chiu (2018, hlm.283) mengemukakan Ciri khas model investasi, produksi, distribusi atau konsumsi- sebuah Fundamentalisme pasar naik ke politik puncaknya pada 1980-an di bawah pemerintahan Thatcher. Meskipun pasar dianggap tidak sempurna dan perkembangan hukum dan peraturan telah memainkan peran dalam mengatasi distorsi dan kegagalan pasar. Inggris model kapitalisme hari ini terus berkembang.

Memastikan sebuah gagasan atau ide akan direalisasikan dalam sebuah kebijakan dan melawan realita yang sedang terjadi tentulah sangat menarik untuk diikuti. Neoliberalisme sebagai sebuah konsep diterjemahkan dalam kebijakan Pasar Bebas oleh Margaret Thatcher. Wapshott & Brpck (1983, hlm. 185). Mengartikan bahwa Thatcher memahami

dan mulai meyakini hingga sampai pada kesimpulan bahwa hanya ekonomi Pasar Bebas yang dapat menjadi kebebasan sejati dan menjadi jalan keluar. Terdapat optimisme dan harapan yang Margaret Thatcher berikan pada Neoliberal.

Langkah privatisasi beberapa perusahaan nasional merupakan komitmen dan bukti kuatnya keyakinan Thatcher dalam melakukan langkah dan mengimplementasikan neoliberalisme. Jika menggunakan istilah umum privatisasi terdengarseperti memberikan hak pada individu atau perseorangan. Tapi sebenarnya istilah yang umum atau sering digunakan di Indonesia adalah swastanisasi. Berpegang pada pengetahuan dan keyakinan neoliberal Thatcher mulai memprivatisasi semua sektor ekonomi tersebut. yang berada dalam kepemilikan negara. Penjualan akan meningkatkan perbendaharaan publik dan membebaskan pemerintah dari masa depan yang memberatkan kewajiban terhadap perusahaan yang hilang (Harvey, 2007, hlm. 60). Perusahaan-perusahaan milik negara ini harus cukup siap untuk privatisasi. Ini berarti mengurangi hutang mereka dan meningkatkan efisiensi. Untuk mengurangi Beban biaya mereka, seringkali melalui pelepasan tenaga kerja. Sekema pengurangan tenaga kerja sering digunakan atas alasan keuangan.

Pendapat Harvey di atas sesuai dengan alasan yang menjadi acuan dasar pelepasan kepemilikan perusahaan Nasional ialah buruknya kinerja perusahaan tersebut. Industri di Inggris telah membuat negara lain iri akan tetapi kinerja dari industri tersebut sekarang memburuk, Keadaan tersebutlah yang membuat kepemilikan harus dilepas. Berkelanjutan dengan buruknya kinerja industri kemudian menciptakan tingkat pengangguran yang tinggi. Industri tidak sesuai dengan harapan yang di inginkan, terkait pertumbuhan juga produktivitasnya. Notabene standar hidup orang di Inggris sangatlah bergantung pada pertumbuhan ekonomi dari industrinya. Sebab Inggris Sudah

dikenal sebagai negara dagang dan sektor pelayanannya. Menelisik lebih dalam dan mengenal Margaret Thatcher dan kebijakannya. Dengan tujuan mengidentifikasi cara Margaret Thatcher melakukan mauver politik dan ekonomi. Peristiwa pelepasan Perusahaan Nasional yang kemudian diprivatisasi menjadi momen penting. Menurut, Harris (2009, hlm. 1) mengejawantahkan dalam dokumen Perdana Menteri menyebutkan privatisasi perusahaan British Aerospace dan Shipbuilders dengan pertimbangan perusahaan tersebut tidak mendukung pemerintah, juga kesulitan dalam mengelolanya. Akan lebih baik bila kepemilikan dilepas dari pemerintah.

Perusahaan membutuhkan modal besar dengan keadaan negara yang kurang baik. sejak 1971 sebenarnya perusahaan induk di Inggris mengharapkan secara substansial seluruh keuntungan tahunan untuk didistribusikan kepada mereka. Melihat jauh ke depan persyaratan masa depan untuk bekerja, pengeluaran modal dan usaha swasta dengan cara pinjaman atau penanaman modal. Sekema penjualan kepemilikan dari negara ke perorangan atau bisa dibidang pihak swasta. Pilihan ini dilakukan guna mengurangi beban negara dan memperluas perkembangan perusahaan.

Selain perusahaan British Aerospace ada beberapa perusahaan yang hendak dijual, hal tersebut demikian mengurangi kepemilikan dari pemerintah Inggris. Donnelly (1983, hlm. 1) dalam dokumen kepemilikan saham pemerintah, pengurangan tersebut akan mengurangi peran pemerintah dalam mengatur keberpihakan pada publik. Pengurangan peran pemerintah dalam sektor industri dan penyerahan pada sistem pasar menegaskan kembali bahwa Thatcher masih konsisten memegang prinsip neoliberal. Bila perlu pemerintah harus menyingkir agar tidak menghambat upaya pasar melakukan pertumbuhan ekonomi. Menjual industri yang dinasionalisasi adalah hasil logis dari Thatcherisme, tetapi itu dimulai secara

tentatif, hampir sebagai renungan. Pertama privatisasi dilakukan pada industri yang tidak memiliki politik yang kuat di daerah pemilihan dan belum banyak diketahui masyarakat diantaranya berikut adalah daftar Industri yang diprivatisasi.

National Freight Corporation (1980), bagian dari British Aerospace (1981), Kabel dan Nirkabel (1981), British Oil (1982), British Rail Hotels (1981), dan Associated British Ports (1983). Seluruh Perusahaan Pengangkutan Nasional dijual kepada karyawannya. Harga saham naik begitu cepat sehingga karyawan yang tidak mengambil kuota saham mereka segera menyesalnya (Reitan, E, A 2003, hlm. 59).

Pada sistem ekonomi sebuah negara yang berfokus pada sektor perdagangan tentunya butuh suplai yang besar terkait dimen yang juga besar dari pasar global. Inggris ditopang oleh ekonomi industri, dalam ekonomi industri tentunya memerlukan investasi yang menjadi pilar penting untuk menopang industri. Sehingga menciptakan pertumbuhan dan perkembangan ke arah positif untuk mendorong inovasi. Pada akhirnya ada harga yang harus diambil oleh perusahaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Seperti halnya industri yang penting secara strategis, peran vitalnya dalam produksi dapat diperdagangkan dalam politik domestik dalam bentuk, deregulasi dan ketidakhadiran intervensi politik atau kontrol atas urusannya (Alt, 2009, hlm. 155).

Di atas telah disebutkan bahwa industri galangan kapal (Shipbuilding) akan di privatisasi. Akan tetapi pada salah satu dokumen pemerintah Inggris menyebutkan tidak jadi menjual salah satu asetnya tersebut dengan mempertimbangkan peluang industri tersebut di masa yang akan datang dan potensinya. Berikut kutipan dari dokumen keputusan mengenai Shipbuilding.

Thatcher: Argumen mengenai keuntungan kepemilikan pribadi berlaku sama untuk industri pembuatan kapal. Mengingat

situasi ini dan sulitnya menentukan ukuran industri di masa depan, pemerintah telah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan pada saat ini untuk mengembalikan perusahaan galangan kapal ke sektor swasta (Manson, 1983, hlm. 2).

Privatisasi industri Nasional, kebijakan yang cukup didukung kabinet Thatcher. Salah satu pendukung Thatcher ialah Nigel Lawson sekretaris menteri keuangan dan menjadi menteri keuangan pada tahun 1983. Ada poin menarik yang disampaikan Lawson pada perdana menteri dalam suratnya terkait gagasan privatisasi industri tahun 1979. Lawson (1983, hlm. 2) ia mengatakan apakah perlu memastikan kekuasaan untuk membuang aset perusahaan baja dan mungkin juga penjualan kabel dan nirkabel dan ia juga berpendapat perusahaan perlu menyadari aset tersebut. Pernyataan yang cukup mengejutkan mengingat industri tambang di Inggris cukup fundamental dan memiliki pekerja yang banyak. Ketika ada rencana perusahaan baja Inggris akan diprivatisasi maka yang akan terkena dampaknya adalah para pekerja. Efisiensi tenaga kerja akan menjadi alasan yang cukup sering digunakan oleh perusahaan. Dan sebenarnya juga Industri tambang dan manufaktur di Inggris sudah mulai bergeser pada sektor jasa. Kendati demikian selisih kepentingan antara pekerja dan pemodal menjadi masalah tersendiri. Akan tetapi sebenarnya pemerintah Inggris dalam melakukan privatisasi sudah terbukti sangat menguntungkan bagi perbendaharaan. Gelombang privatisasi dimulai pasca 1983 membawa £ 10 miliar ke kas Departemen Keuangan dan aliran pendapatan yang disediakan untuk pengurangan pajak sebagai pajak perusahaan, pajak tarif bisnis dan tarif dasar pajak penghasilan semuanya (Crines, dkk. 2016 hlm. 30-31).

Thatcher sepenuhnya nyaman dengan menjelaskan alasan untuk privatisasi seperti dengan mengekspos perusahaan-perusahaan milik negara. Secara lebih penuh untuk mendisiplinkan dan memperluas peluang

pasar dengan mengurangi gangguan politik, itu meningkatkan efisiensi bisnis dan dengan demikian kinerja ekonomi meningkat secara keseluruhan (Crines, Dkk. 2016, hlm.47). Dia juga tahu sepenuhnya bahwa itu menciptakan teka-teki politik bagi buruh. Jika pemerintah diuntungkan karena mengejar privatisasi dan buruh disudutkan, dia bisa menanggapi dengan mengatakan bahwa administrasi ketenagakerjaan di masa depan akan dinasionalisasi ulang. Untuk melakukan nasionalisasi industri yang akan berkembang tentu tidak akan mudah. Ini memperbesar keuntungan Partai Konservatif dengan berdiri diantara dua sisi. Meskipun privatisasi akan kehilangan daya tariknya di era Major, itu jelas bermanfaat untuk Konservatif di bawah Thatcher. Mereka dihitung telah meningkat bagian suara mereka sebesar 1,6 persen pada tahun 1987 sebagai konsekuensi dari bagian tersebut penjualan yang terkait dengan privatisasi (Disney, 2009 , hlm. 5)

Pasar Tenaga Kerja

Margaret Thatcher sebagai peletak pertama kepemimpinan perempuan tentunya diharapkan memberi ruang yang lebih pada perempuan lain. Harapan tersebut yang tentunya ada dalam benak setiap wanita Inggris atau para penggiat gerakan perempuan pada umumnya. Pada dasarnya itu merupakan harapan dan angan-angan saja dan akan patah seiring waktu. Seperti yang terjadi ketika Thatcher menyikapi tingginya angka pengangguran, solusi yang ia tawarkan adalah menghidupkan doktrin ekonomi neoliberal. Pendekatan yang menekan atau berpusat pada pasar yang mencari tenaga kerja yang kurang terorganisir seakan melengkapi puzzle yang terpecah di awal. Ketika Thatcher mengurangi kekuatan serikat buruh dan berkonfrontasi langsung. Pada akhirnya inilah yang menjadi tujuan dari Thatcher. Sangat masuk akal sebab serikat buruh yang mengorganisir para pekerja untuk mogok dan melakukan pemboikotan

setara upaya lainnya. Tentunya itu merepotkan bagi para pemilik industri.

Pemilik industri strategi merupakan pemerintah, secara tidak langsung serikat buruh membebani pemerintah. Maka upaya privatisasi merupakan satu rangkaian yang saling terhubung. Guna memperkuat setiap mauver kebijakan Thatcher langkah yang cukup panjang serta perdebatan yang tidak mudah. Hasilnya seperti yang diharapkan oleh Thatcher namun belum tentu sesuai dan menyelesaikan masalah publik. Pada titik ini juga, neoliberalisme terbukti mengurangi hambatan struktural. Dalam Crines, dkk (2016, hlm. 35) Tahun 1984 Thatcher menyatakan bahwa dia menyerang sikap oposisi buruh dan motif mereka. Dia akan berpendapat bahwa Partai Buruh telah mendukung pemogokan ini, ia akan menekan buruh tidak peduli berapapun biayanya, tidak peduli apa kerusakannya, dan tidak peduli berapa banyak pekerjaan yang hilang. Ketika serikat bekerja sebagai wali atau perwakilan, itu membuat kerepotan bagi pemerintah dan pemilik perusahaan. Serikat buruh selalu meminta banyak tuntunan terkait upah juga keberlangsungan pekerja. Namun Thatcher memutuskan itu sedikit demi sedikit. Pendekatan yang berpusat pada pasar ini menolak strategi wali dominan di Inggris sebelum 1979, dan menggabungkan prinsip neoliberal dengan negara yang kuat. Pemerintah mengarahkan juga meningkatkan bagian dari modal politik dan kekayaan bangsa menjadi rezim kebijakan agresif yang bertujuan menciptakan upah lebih rendah, dan tenaga kerja yang lebih berorientasi bisnis. Aktivisme Thatcher dan pemerintah terbukti dalam perluasan Komisi Layanan Tenaga Kerja, sementara di sisi lain neoliberalismenya terlihat dalam serangan terhadap hambatan untuk menurunkan upah, dalam perubahan program untuk menanamkan inisiatif individu, dan dalam memperbaharui sistem ketenagakerjaan dan pelatihan.

Meskipun terlihat sesuai dengan yang diharapkan Thatcher pada titik ini justru

menimbulkan masalah bagi para tenaga kerja. Bagaimana tidak buruh adalah masyarakat kelas bawah yang sangat rentan terhadap perubahan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Sebagai gambaran tekanan Thatcher pada buruh terbukti pada tahun 1984 Thatcher memprovokasi pemogokan penambang pada tahun 1984 oleh mengumumkan gelombang pemutusan hubungan kerja dan penutupan tambang dengan alasan batubara impor lebih murah. Pemogokan berlangsung selama hampir satu tahun, terlepas dari banyak simpati dan dukungan publik, para penambang kalah juga elemen inti dari gerakan buruh Inggris telah rusak (Harver, 2007, hlm. 59).

Selanjutnya Thatcher mengurangi kekuatan serikat buruh Inggris dengan membuka persaingan asing dan investasi asing. Terbentuknya pasar tenaga kerja membuat nasib dari para buruh bergantung pada transaksi bisnis para pemegang saham. Mereka bisa dikeluarkan sewaktu-waktu. Thatcher selalu menganggap bahwa bukan tidak ada pekerjaan yang membuat banyaknya pengangguran, tapi karena para buruh tidak mau mengambil pekerjaan yang ada.

Sistem yang dibuat pemerintah Inggris telah memasukkan para tenaga kerja dalam situasi yang rawan. Kendati demikian ada solusi dari pemerintah dalam situasi sulit tersebut yaitu jaring pengaman sosial. Program jaring pengaman sosial ini yang menjadi fokus ialah asuransi, baik untuk yang bekerja maupun yang menganggur. Perubahan utama yang mempengaruhi pengangguran di Inggris sekitar tahun 1980-1990. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat celah pada jaring pengaman tersebut. Perlu ditekankan sebelumnya, sebagian besar dari mereka yang berhak justru tidak mengklaim hak mereka. Angka resminya adalah bahwa tingkat penerimaan untuk pengangguran pada tahun 1983 adalah 81 persen. Ini berarti satu dari lima orang tidak menerima hak mereka, dan, meskipun pengambilalihan diukur dalam hal nilai mungkin lebih tinggi, jaring pengaman

ternyata memiliki lubang (Atkinson, 1996, hlm. 170)

Berbagai macam faktor dapat menyebabkan penyimpangan ini, salah satunya ekspektasi terbentuk secara berbeda pada para pekerja atau buruh. Mereka cenderung menganggap solusi ini tidaklah menyelesaikan inti masalah mereka. Ditambah lagi situasi yang tidak jelas berkaitan dengan reformasi kebijakan ekonomi. Alt (2009, hlm. 167) Perbedaan pasar, kebijakan moneter yang tidak stabil, dan juga kebutuhan akan barang-barang perdagangan yang berubah. Faktor-faktor inilah yang membuat jaring pengaman tidak terlalu efektif sebab masih terdapat lubang dan celah.

Sebagian besar keluarga dengan ekonomi lemah, selain yang mengandung, lanjut usia dan orang cacat, tidak memiliki sumber penghasilan tetap selain upah atau gaji dari pekerjaan (Disney, 2009, hlm.34). Keadaan ini menambah beban, meskipun beberapa pekerja yang dipekerjakan setiap hari, semua menghadapi potensi risiko kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Risiko pengangguran dan akibatnya kehilangan pendapatan bervariasi sesuai dengan karakteristik pribadi individu dan cabang industri tempat mereka bekerja. Pekerja berusaha untuk meningkatkan daya tawar mereka dengan pengusaha dengan mengorganisir ke dalam perdagangan serikat buruh, dan asosiasi tersebut dapat mencoba untuk mengimbangi risiko yang terkait. Beberapa yang berada di pihak kelas pekerja berpandangan cukup mendalam seperti berikut. Garis argumen yang berpengaruh adalah kekuatan atau kekuasaan kelas pekerja menjadi penjelasan sumber daya. Didasarkan pada gagasan bahwa sumber daya ekonomi didistribusikan secara tidak merata di antara kelas-kelas sosial, perspektif ini memperhitungkan hasil kebijakan dalam hal kekuatan relatif tenaga kerja dan modal (Hellwig, 2005, hlm. 110)

Ketidakcukupan sumber daya kekuasaan dan pendekatan otonomi negara telah menyebabkan pengembangan sintesis penjelas.

Pendekatan sintesis bervariasi menurut kelasnya, apakah kelas tunduk pada struktur negara atau apakah negara hanya menyediakan batas-batas dimana kelas diperjuangkan atau dimainkan. Hellwig (2005, hlm. 113) juga berpendapat bahwa jika berpusat pada pendekatan politik, negara memiliki sumber kekuatan independen yang berakar pada sumber daya seperti administrasi fungsi kolektif dan monopoli kontrol atas penggunaan kekuatan yang sah. Margaret Thatcher telah menciptakan sistem yang dikendalikan oleh pihak independen pada cakupan ini ialah para pebisnis. Tuntutan akan inovasi dari pasar global membuat negara harus berubah. Para pemilik usaha atau dalam kasus ini ialah para pegang saham industri. Diharuskan terus berinovasi untuk mengikuti keinginan pasar. Inovasi yang cepat tentu baik bagi kemajuan namun pada sisi lain menjadi ketidakpastian bagi para pekerja. Inovasi menjadi solusi dari pasar global dan dampak dari pasar bebas. Pada dasarnya inovasi memiliki tujuan yang baik. Tujuan utama dari kebijakan inovasi adalah pertumbuhan ekonomi dan daya saing internasional. Di Uni Eropa tentu tujuan ini digabungkan dengan sosial dan permintaan pasar. Inovasi juga dapat dilihat sebagai cara untuk memecahkan masalah-masalah penting yang berkaitan dengan polusi, energi, urbanisme, dan kemiskinan. Tetapi fokus utamanya adalah pada penciptaan ekonomi kekayaan (Galabova, 2012, hlm. 3).

Harus dicatat bahwa hampir semua kebijakan yang dibuat Thatcher memiliki agenda dan konfrontasi dengan serikat pekerja dalam konteks pengangguran tinggi. Resesi dan pengangguran memberikan alasan yang sempurna untuk jadi latar belakang mengatasi masalah serikat pekerja karena pelemahan yang tidak terhindarkan. Dampaknya terhadap serikat pekerja dalam hal jumlah keanggotaan dan kesediaan mereka yang masih bersedia untuk mogok. Gerakan serikat pekerja di Inggris, kemudian dirusak oleh undang-undang yang dikeluarkan Thatcher, simbol

pentingnya pemogokan para penambang dan iklim ekonomi (Cooper, 2012, hlm. 130). Seperti menjelaskan, balas dendam politik hanya menjelaskan motivasi di balik tindakan Thatcher melawan serikat pekerja sampai batas tertentu. Thatcher berusaha untuk mengembalikan serikat pekerja ke apa yang dilihat oleh Konservatif sebagai peran sah mereka, yaitu, Margaret Thatcher sebagai perwakilan dari kepentingan industri dan buruh di tempat kerja juga keanggotaan. mereka bukannya menjadi senjata politik aktivis sayap kiri.

SIMPULAN

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan atau langkah yang diupayakan Margaret Thatcher bertujuan mereformasi Ekonomi Inggris pada kurun 1979-1990. Pada dasarnya kebijakan ekonomi harus memiliki landasan yang kuat. Dalam upaya Thatcher membangun dasar yang kokoh terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan yang mendasar. Dari serangkaian peristiwa yang penting langkah yang di ambil oleh Thatcher tampak kontroversial namun penting.

Kebijakan yang tidak populer di masyarakat menimbulkan citra yang buruk bagi Thatcher namun keyakinan yang ia miliki pada gagasan neoliberal membuat langkah dan setiap kebijakan yang diambil kokoh. Ketika masyarakat atau khususnya golongan kelas bawah di Inggris mulai terkena dampak Thatcher tetap teguh pada pendiriannya. Itu di tegaskan dengan pemotongan anggaran publik.

Tenaga kerja atau buruh yang terlalu banyak menuntut dan merugikan negara, Thatcher mengkeritik habis denga sebutan orang-orang yang terlalu banyak memilih. Bukan masalah pekerjaan yang tidak ada namun para pekerja yang tidak ingin mengambil pekerjaan yang ada. Pendapat Thatcher bila dilihat dari sudut

buruh terlihat kejam dan tidak memikirkan kesejahteraan pekerja. Tetapi kalau dicermati dan mengambil sudut pandang yang berbeda upaya Thatcher ini dapat dibenarkan. Sebab tujuan dari Thatcher adalah merubah Ekonomi Inggris menuju ekonomi pasar bebas.

Pemimpin selalu dihadapkan dalam dilema dan pilihan sulit, apa yang dilakukan Margaret Thatcher dapat dikatakan tepat setidaknya untuk penyelesaian jangka pendek. Terbukti dari hasil yang telah dicapai Thatcher yang berhasil mendapatkan keuntungan besar dengan keluarnya Inggris dari resesi dan pasar tenaga kerja terbentuk. Membuat Inggris masuk pada ekonomi pasar bebas, secara penerapan kebijakan dan gagasan Thatcher telah berhasil. Kendati demikian apa yang dilakukan oleh Thatcher belum sepenuhnya membawa kebaikan bagi semua lapisan masyarakat Inggris. Terlepas dari semua pencapaian yang didapat oleh Margaret Thatcher selama memimpin. Tetap ada sisi gelap yang ditinggalkan dan membekas dalam sosial politik Inggris bahkan hingga saat ini

REFERENSI

- Aitken, J. (2013). *Margaret Thatcher: Power and personality*. Bloomsbury Publishing Plc.
- Alt, J. E. (1987). Crude politics: Oil and the political economy of unemployment in Britain and Norway, 1970–85. *British Journal of Political Science*, 17(2), 149–199.
- Atkinson, A. B. (1996). *Income maintenance for the unemployed in Britain and the response to high unemployment*. Cambridge University Press, 168–183.
- Bew, P. (2009). *The blind leading the blind? London's response to the 1969 crisis*. Wordwell Ltd.
- Chiu, I. H. Y. (2018). An institutional theory of corporate regulation. *Current Legal Problems*, 71(1), 279–334. <https://doi.org/10.1093/clp/cxy007>

- Clarke, P. (2010). *Hope and glory: Britain 1900–2000*. Penguin Books.
- Cooper, J. (2012). *Margaret Thatcher and Ronald Reagan: A very political special relationship*. Palgrave Macmillan.
- Crines, A. S., Jeffery, D., & Heppell, T. (2016). *The political rhetoric and oratory of Margaret Thatcher*. Macmillan Publishers.
- Detya, W., & Wawan, D. (2019). Peran komunikasi media dan ekonomi terhadap politik di Indonesia. *ArtComm – Jurnal Komunikasi dan Desain*, 2(1), 37–45. <https://jurnalunibi.unibi.ac.id/ojs/index.php/ArtComm>
- Disney, R. (1982). Theorising the welfare state: The case of unemployment insurance in Britain. *Journal of Social Policy*, 11(1), 1–57. <https://doi.org/10.1017/S0047279400011469>
- Donnelly, M. E. (1983, January 11). Residual government shareholdings. London.
- Evans, E. J. (2004). *Thatcher and Thatcherism (2nd ed.)*. Routledge.
- Galabova, L. P. (2012). Developing a knowledge-based economy through innovation policy: The cases of Bulgaria, Finland and Scotland. *Science and Public Policy*, 1–13. <https://doi.org/10.3152/147154312X13403796798050>
- Gamble, A. (1988). *The free economy and the strong state: The politics of Thatcherism*. Macmillan Education.
- Gilmour, I. (1992). *Dancing with dogma: Britain under Thatcherism*. Simon & Schuster.
- Harris, T. G. (1979, July 20). *Economic policy: Privatisation part 1*. Margaret Thatcher Foundation.
- Harvey, D. (2007). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press.
- Hellwig, T. (2005). The structure of British private industry. *Perspectives on Politics*, 3(2), 110–112.
- Horton, R., & Simone, S. (2006). *Women who changed the world*. PT Gelora Aksara Pratama.
- Ismaun, H., Sjamsuddin, H., & Darmawan, W. (2016). *Pengantar ilmu sejarah*. APPS.
- Jessop, B. (2002). *The future of the capitalist state*. Polity Press.
- Lawson, H. (1983, January 11). *Treasury Chamber, Parliament Street SW1P 3AG*. London.
- Lloyd, T. (1994). Thatcher and her ministers. *A Quarterly Journal Concerned with British Studies*, 26(4), 645–653.
- Manson, F. (1983, January 11). *Draft statement on the future of British Aerospace and British Shipbuilders*. London.
- Middleton, R. (2000). *Government versus the market: The growth of the public sector, economic management and British economic performance, c.1890–1979*. Edward Elgar.
- Moore, C. (2013). *Margaret Thatcher: The authorized biography, Volume I: Not for turning*. Allen Lane.
- Reitan, E. A. (2003). *The Thatcher revolution: Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, and the transformation of modern Britain 1979–2001*. Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Riddell, P. (1985). *The Thatcher government: The politics of policy*. Basil Blackwell.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi penelitian sejarah*. Ombak.
- Skidelsky, R. (2010). *Keynes: The return of the master*. PublicAffairs.
- Thain, C., & Wright, M. (1995). *The Treasury and Whitehall: The planning and control of public expenditure, 1976–1993*. Clarendon Press.
- Thatcher, M. (1993). *The Downing Street years*. HarperCollins.

- Tomlinson, J. (2016). *Managing the economy, managing the people: Narratives of economic life in Britain from Beveridge to Brexit*. Oxford University Press.
- Wapshott, N., & Brock, G. (1983). *Thatcher: The major new biography*. Maxwell House Ltd.